

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(IKJIP)
TAHUN 2018



DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2013 - 2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Koperasi dan UKM disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan UKM. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Koperasi dan UKM, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Koperasi dan UKM. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Koperasi dan UKMTahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 11 Indikator kinerja utama, terdapat 6 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Bontol

H. AYUSUF, S.IP, MH

NIP. : 19690905 1989031 003

Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	3
Struktur Organisasi	11
Komposisi SDM Organisasi	13
Isu Strategis	14
Inovasi Pelayanan Publik	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 15
Rencana Strategis	15
Visi dan Misi	15
Tujuan dan Indikator Kinerja	16
Sasaran dan Indikator Kinerja	19
Program untuk Pencapaian Sasaran	22
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	23
Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
Rencana Anggaran Tahun 2018	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 29
Capaian Kinerja Organisasi	29
Capaian Indikator Kinerja Utama 2018	30
Perbandingan Capaian Kinerja	34

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 36

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Anggaran 77

BAB IV PENUTUP 81

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Data Pejabat Struktural	12
Tabel 1.2	Data PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Penyuluh	13
Tabel 2.1	Tujuan dan indikator kinerja	18
Tabel 2.2	Sasaran dan indikator kinerja	21
Tabel 2.3	Program untuk pencapaian sasaran tahun 2018	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2018	24
Tabel 2.5	IKU Dinas koperasi	25
Tabel 2.6	Rencana Belanja Dinas Koperasi dan UKM	26
Tabel 2.7	Alokasi Per Sasaran tahun 2018	27
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal	29
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran	30
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018	31
Tabel 3.4	Persentase kategori Pencapaian Indikator Sasaran	32

Daftar Gambar

Foto penghargaan dan pembinaan koperasi	86
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi

dan UKM. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Koperasi dan UKM merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN UKM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan UKM diatur dalam Peraturan Bupati no. 77 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris dengan 2 sub bagian
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dengan 2 seksi
- d. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan 2 seksi
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan 2 seksi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

TUGAS :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

TUGAS :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

FUNGSI :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan program dan anggaran.
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS :

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman

surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.

- c. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian.
- d. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
- e. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- g. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya.
- h. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset.
- i. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS :

- a. Melaksnakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah.
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja.
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan.

- f. Membuat rencana kerja tahunan.
 - g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas.
 - i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
 - j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.
 - k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala.
 - m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan.
 - p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

2.2 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN

TUGAS :

Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Menganalisis dokumen izin pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

- d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi.
- e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit usaha simpan pinjam.
- f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

- KEPALA SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN

TUGAS :

Kepala Seksi Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.
- b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terkait tugasnya

- KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILIAIAN KESEHATAN

TUGAS :

- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
- b. Melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- d. Memeriksa dan mengawasi kelembagaan dan usaha koperasi.
- e. Memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

2.3.KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

TUGAS :

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi.

FUNGSI :

- a. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- b. Pengorganisasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- e. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- g. Pelaksanaan perlindungan koperasi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.4 KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI**TUGAS :**

- a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
- c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal dan nasional.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**TUGAS :**

- a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI

TUGAS :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

2.5 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

TUGAS :

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

FUNGSI :

- a. Pengordinasian pemberdayaan dan Perlindungan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- c. Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Pengordinasian pendataan izin usaha mikro kecil menengah (IUMK)
- e. Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- f. Pengordinasian penengembangan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO

TUGAS :

- a. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- b. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK)
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

TUGAS :

- a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
- b. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

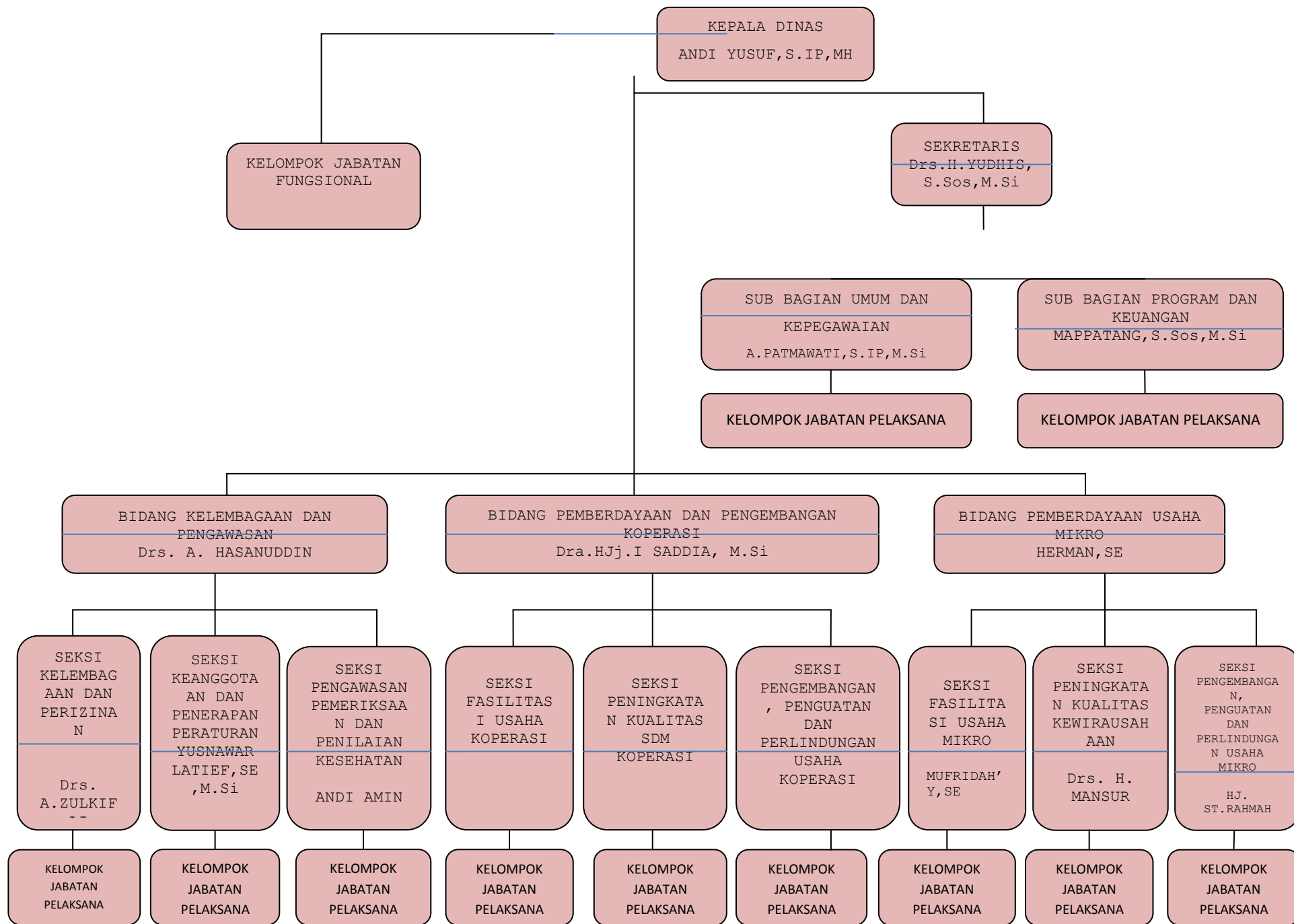
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN

TUGAS :

- a. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan
- c. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

Dinas Koperasi dan UKM memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi



Susunan Kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural
Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2018

Unit Kerja	Eselon			PNS	
	IV	III	II	GOL I	GOL III
Kepala DINAS	-	-	1	-	-
- Sekretaris					
□ Kasubbag Umum dan Kepegawaian					1
□ Kasubbag Program Dan Keuangan		1			1
- Bidang Kelembagaan	1	-	-	-	-
□ Kepala Seksi Kelembagaan Dan Perizinan	1	-	-	-	-
□ Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan		1			1
□ Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Peneilaian Kesehatan	1	-	-	-	-
- Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperas	1	-	-	-	-
□ Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi		1	-	-	1
□ Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1	-			-
□ Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha	1	-	-	-	-
- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro					
□ Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	-	1	-	-	-
□ Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	1	-	-	-	1
□ Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro	1	-	-	-	-
Jumlah	11	4	1	-	3

Tabel 1.2

**Data PNS, Tenaga Kontrak ,Tenaga
Penyuluh Koperasi dan Pendamping
UKM Dinas Koperasi dan UKM Kab.
Bone Tahun 2018**

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidika n Formal	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk.I (IV/b) s/d Pembina (IV/a)	S1 / S2	3	
4	Ka. Sub Bag / Bid	Pembina (IV/a) s/d Penata Tk.I(III/d)	SMA / S1 / S2	8	
5	S t a f	Pengatur (II/c) s/d Penata Tk.I (III/d) - Tenaga Kontrak - Tenaga Pendamping UKM (Kontrak) - Tenaga Penyuluh Koperasi (Kontrak)	SMA / S1 / S2 SMA / S1 S1 S1/S2	8 4 5 8	
J U M L A H				380	

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

1. Menjadikan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.
2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil
5. Meningkatkan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Galeri PADAIDI sebagaimana Dinas Koperasi dan UKM menyiapkan sarana usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro untuk pemasaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI :

Untuk mewujudkan masa depan yang akan mencerminkan kebutuhan yang fundamental dalam bidang koperasi dan UKM, maka visi koperasi dan UKM dilaksanakan dengan merefleksikan kebutuhan kedalam dinamika pembangunan koperasi dan UKM dari berbagai aspek, dengan tetap mengacu pada visi-misi Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan program pembangunan koperasi dan UKM yang diimplementasikan kedalam program jangka menengah/program tahunan sesuai visi – misi koperasi dan UKM, dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan.

Rumusan visi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 adalah **“Terwujudnya Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas, Mandiri, Berdaya Saing”**

Penjelasan Visi :

1. **Koperasi:** adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. **Berkualitas:** sebagai badan usaha yang sukses, sehat dan maju, serta sekaligus sebagai koperasi yang sejati. Artinya, koperasi tersebut tersebut mampu mewujudkan dirinya

sebagai badan usaha yang dapat menjalankan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku secara baik dan berhasil, dan sekaligus juga bisa mewujudkan dirinya sebagai organisasi koperasi yang benar-benar taat asas dan konsisten dengan prinsip-prinsip koperasi.

3. **Mandiri** : koperasi yang menganut nilai dan prinsip dalam melaksanakan kegiatan dengan menolong diri sendiri. Artinya kemandirian ditempatkan dalam kerangka hidup dengan menolong diri sendiri.
4. **Berdaya Saing** : dinamis, memiliki daya tarik manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang berdasarkan pada efisiensi biaya serta memiliki peluang seiring dengan persaingan bisnis.

2.1.2 MISI:

Sebagai implementasi dari visi tersebut, maka dirumuskan Misi Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM yang berkualitas dalam program penciptaan iklim usaha KUKM yang kondusif.
2. Mendorong, memfasilitasi produk unggulan yang berdaya saing melalui program pengembangan kewirausahaan dan unggulan kompetitif UKM.
3. Mengembangkan sistem permodalan dalam program pengembangan system pendukung usaha bagi UKM.
4. mengembangkan profesionalisme SDM melalui program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
5. Mendorong dan mengembangkan peranan koperasi dan UKM untuk memerangi kemiskinan, pengangguran dan menciptakan lapangan kerja melalui program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

2.1.3 TUJUAN DAN INDKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 Mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM yang berkualitas dalam program penciptaan iklim usaha KUKM yang kondusif.

Tujuan:

1. Mendorong pertumbuhan jumlah Koperasi
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah

Misi 2. Mendorong produktivitas produk unggulan yang berdaya saing melalui program pengembangan kewirausahaan dan unggulan kompetitif UKM.

Tujuan:

1. Meningkatkan produktifitas, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha.

Misi 3. Mengembangkan sistem permodalan dalam program pengembangan system pendukung usaha bagi UKM.

Tujuan :

1. Menciptakan mekanisme permodalan bagi Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan
2. Meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.

Misi 4. Mengembangkan profesionalisme SDM melalui program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan produksi
2. Meningkatkan cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku

Misi 5.Mendorong dan mengembangkan peranan koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah untuk memerangi kemiskinan, pengangguran dan menciptakan lapangan kerja melalui program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Tujuan :

- 1 Menyiapkan lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi Dan UKM

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mendorong pertumbuhan jumlah koperasi	Persentase Koperasi aktif	Persen	51,13	51,13
	Jumlah LKM	Unit	4	4
Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Unit	4.570	4.570
Meningkatkan produktifitas, koperasi dan usaha mikro, kecil menengah dalam berbagai sector dan kegiatan usaha	Pertumbuhan Omzet koperasi	Rupiah (Milyar)	350.346	350.346
	Pertumbuhan Omzet UKM	Rupiah (Milyar)	990	990
Menciptakan mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov / Nasional	Kegiatan	6	6
Meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	105.044	105.044
Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola koperasi , usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	Jumlah Pegawai koperasi	Orang	6.274	6.274
Meningkatkan cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Pertumbuhan Aset Koperasi	Rupiah (Milyar)	288.817	288.817
	Pertumbuhan Aset UKM	Rupiah (Milyar)	125	125
Menyiapkan lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , usaha kecil menengah	Jumlah Pegawai UKM	Orang	16.000	16.000

2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Mendorong pertumbuhan jumlah Koperasi

Sasaran :

Meningkatnya jumlah koperasi aktif

Tujuan 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran :

Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi Usaha Kecil Menengah.

Tujuan 3. Meningkatkan produktifitas, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha

Sasaran :

Meningkatnya produktifitas Produk Unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha

Tujuan 4. Menciptakan mekanisme permodalan bagi Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan

Sasaran :

Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah dengan jaringan kelembagaan keuangan

Tujuan 5. Meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha

Sasaran :

Meningkatnya akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana

Tujuan 6. : Meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi, Usaha Kecil menengah dalam melakukan produksi

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas SDM pengelola koperasi, Usaha Kecil menengah dalam melakukan produksi

Tujuan 7 : Meningkatkan cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku

Sasaran :

Meningkatkan cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku

Tujuan 8. : Menyiapkan lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , usaha kecil dan menengah

Sasaran :

Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , usaha kecil dan menengah

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi aktif	Persen	51,13	51,13
	Jumlah LKM	Unit	4	4
Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Unit	4.570	4.570
Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	Pertumbuhan Omzet koperasi	Rupiah (Milyar)	350.346	350.346
	Pertumbuhan Omzet UKM	Rupiah (Milyar)	990	990
Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov / Nasional	Kegiatan	6	6
Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	105.044	105.044
Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	Jumlah Pegawai koperasi	Orang	6.274	6.274
Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Pertumbuhan Aset Koperasi	Rupiah (Milyar)	288.817	288.817
	Pertumbuhan Aset UKM	Rupiah (Milyar)	125	125
Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil menengah	Jumlah Pegawai UKM	Orang	16.000	16.000

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , usaha kecil menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Koperasi dan UKM telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi aktif	Persen	51,13
	Jumlah LKM	Unit	4
Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Unit	4.570
Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	Pertumbuhan Omzet koperasi	Rupiah (Milyar)	350.346
	Pertumbuhan Omzet UKM	Rupiah (Milyar)	990
Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov / Nasional	Kegiatan	6
Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	105.044
Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	Jumlah Pegawai koperasi	Orang	6.274
Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Pertumbuhan Aset Koperasi	Rupiah (Milyar)	288.817
	Pertumbuhan Aset UKM	Rupiah (Milyar)	125
Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil menengah	Jumlah Pegawai UKM	Orang	16.000

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi dan UKM telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Dinas Koperasi dan UKM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi aktif	Persen	(Jumlah Koperasi akti) / (Jumlah seluruh koperasi se kab. Bone) X 100 % ; Tipe penghitungan : Komulatif	Rekap hasil laporan Keragaan Koperasi dari Bidang Kelembagaan Dan Usaha Koperasi
	Jumlah LKM	Unit	Peningkatan jumlah LKM	Data Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Unit	Peningkatan jumlah UKM	Data Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	Pertumbuhan Omzet koperasi	Rupiah (Milyar)	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Data Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
	Pertumbuhan Omzet UKM	Rupiah (Milyar)	Pertumbuhan Omzet UKM	Data Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov / Nasional	Kegiatan	Peningkatan Jumlah Kegiatan fsailitasi Kemitraan	Data Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Bidang Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi

Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	Peningkatan Jumlah anggota Koperasi	Rekap hasil laporan Keragaan Koperasi dari Bidang Kelembagaan Dan Usaha Koperasi
Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	Jumlah Pegawai koperasi	Orang	Peningkatan jumlah pegawai Koperasi	Rekap hasil laporan Keragaan Koperasi dari Bidang Kelembagaan Dan Usaha Koperasi
Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Pertumbuhan Aset Koperasi	Rupiah (Milyar)	Pertumbuhan jumlah aset koperasi	Data Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
	Pertumbuhan Aset UKM	Rupiah (Milyar)	Pertumbuhan jumlah aset UKM	Data Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil menengah	Jumlah Pegawai UKM	Orang	Peningkatan Jumlah pegawai UKM	Data Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 4.798.969.829,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Koperasi Dan UKM TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.798.969.829,00	37,49
2	Belanja Langsung	3000.000.000	62,51
Jumlah			100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi aktif	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi Prinsip Pemahaman Perkoperasian	95.169.400	3,17 %
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	71.200.000	2,37 %
			Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	102.025.000	3,4 %
			Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprsetasi	160.670.000	3,45,36 %
	Jumlah LKM		Pembinaan / Pemantauan Administrasi keuangan KSP/USP	199.200.000	6,64 %
Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro kecil Menengah	Pendataan UKM	80.900.000	2,7 %
			Penyelenggaraan Promosi Produl Usaha Mikro Kecil dan Menengah	274.960.000	9,17 %
Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	Pertumbuhan Omzet koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus / pengelola USP	78.304.000	2,61 %
	Pertumbuhan Omzet UKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro kecil Menengah	Penyelenggaraan Promosi Produl Usaha Mikro Kecil dan Menengah	274.960.000	9,17 %
Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov / Nasional	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	38.878.000	1,3 %
Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya	Jumlah Anggota Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	76.990.000	2,57 %

produktif, sarana dan prasarana usaha					
			Pembinaan Dan Pemantauan Adminstrasi Koperasi Pengelola Pasar Tradisional	69.100.000	2,3 %
Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi , usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	Jumlah Pegawai koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus / pengelola USP	78.304.000	2,61 %
Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Pertumbuhan Aset Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	105.466.000	3,52 %
			Pembinaan / Pemantauan Administrasi keuangan KSP/USP	199.200.000	6,64 %
	Pertumbuhan Aset UKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro kecil Menengah	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro	46.700.000	1,56 %
Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , usaha kecil menengah	Jumlah Pegawai UKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro kecil Menengah	Penyelenggaraan Promosi Produl Usaha Mikro Kecil dan Menengah	274.960.000	9,17 %

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 429.064.400 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya jumlah koperasi aktif dengan besaran 14,3 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran pertumbuhan omzet UMKM yaitu sebesar 9,17 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku sebesar 1,56 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Dinas Koperasi Dan UKM telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 8 sasaran dengan 11 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 2 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 1 indikator kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	2	BS = C =	B = 1 K = 1	SK =
2.	Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	1	BS = C =	B = 1 K =	SK =
3.	Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	2	BS = C = 2	B = K =	SK =
4.	Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	1	BS = C =	B = 1 K =	SK =
5.	Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha	1	BS = C = 1	B = K =	SK =
6.	Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	1	BS = C = 1	B = K =	SK =
7.	Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	2	BS = C =	B = 2 K =	SK =
8.	Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil menengah	1	BS = C =	B = 1 K =	SK =
	JUMLAH	11	BS = C = 4	B = 6 K = 1	SK =

3.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama

harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan sehat	Persentase Koperasi aktif	51,13	30,39	59,4
		Jumlah LKM	4	9	100
	Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	4.570	11.708	100
	Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	Pertumbuhan Omzet koperasi (Milyar)	350,346	240,639	68,7
		Pertumbuhan Omzet UMKM (Milyar)	990	678,834	68,6
	Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov / Nasional	6	6	100
	Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha	Jumlah Anggota Koperasi	105.044	70.865	67,5

	Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi , usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi	Jumlah Pegawai koperasi	6.274	4131	66 %
	Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Pertumbuhan Aset Koperasi (Milyar)	288,817	1.108,788	100
		Pertumbuhan Aset UMKM (Milyar)	125	271,765	100
	Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , usaha kecil menengah	Jumlah Pegawai UKM	16.000	29.257	100

Dari 8 sasaran dengan 11 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.4
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1 Meningkatnya jumlah koperasi aktif			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100
3.	Cukup		
4.	Kurang	1	59,4
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah		
Sasaran 2 Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
	Jumlah		
Sasaran 3 Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik		
3.	Cukup	2	68,7 dan 68,6
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah		
Sasaran 4 Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah		
Sasaran 5 Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik		
3.	Cukup	1	67,5
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah		
Sasaran 6 Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola koperasi , usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik		

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
3.	Cukup	1	66
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah		
Sasaran 7 Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	2	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah		
Sasaran 8 Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , usaha kecil menengah			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah		

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 8 sasaran dengan 11 indikator kinerja, diketahui bahwa 6 .indikator sasaran atau 100.% Baik, 4 indikator sasaran atau 68.%cukup dan 1 indikator sasaran atau 59,4% kurang

3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi Dan UKM tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Dinas Koperasi dan UKM dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1: Meningkatnya jumlah koperasi aktif

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

**Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif**

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Persentase Koperasi Aktif	51,13	30,39	59,4
b.	Jumlah LKM	4	9	100

1. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu persentase koperasi aktif, dengan capaian ***kurang dari target*** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 30,39 %, dari target 51,13 % dengan persentase 59,4 %. Capaian ini dikategorikan Kurang. Pada tahun 2018 Jumlah koperasi aktif 148 unit dan jumlah keseluruhan koperasi yang berbadan hukum sebanyak 487 unit koperasi. Persentase koperasi aktif diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi}} \times 100 \%$$

$$= \frac{144}{487} \times 100 \%$$

2. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Jumlah LKM, dengan capaian **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 9 LKM, dari target 4 LKM dengan persentase 100 %. Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.6. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Persentase Koperasi aktif (%)	58,96	85,1	30,39
b.	Jumlah LKM	9	9	9

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 30,39 %. dari target 51,13 %, mengalami penurunan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 54,7 %

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase Koperasi aktif

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi RI No. 23 Tahun 2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi RI No. 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah maka dalam pemberian acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan pengumpulan data koperasi dan UKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada kementerian dan SKPD yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan yang disebut ODS (Online Data System) dimana indikator koperasi aktif yang dulunya hanya didasarkan pada pelaksanaan kegiatan unit usaha (aktif secara usaha) sekarang indikator koperasi aktif meningkat, yaitu koperasi yang telah 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (aktif secara kelembagaan dan usaha).

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah koperasi aktif di tahun 2018, meskipun demikian jumlah koperasi aktif dapat dipertahankan sebesar 148 koperasi atau 30,39 persen. Oleh karena itu realisasi indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2018 yaitu 30,39 % (kurang dari target) capaian RPJMD yang diharapkan.

2. Pertumbuhan Omzet UMKM

Berdasarkan Tabel 3 capaian indikator kinerja sasaran 1 dengan indikator kinerja Pertumbuhan Omzet UMKM tahun 2018 adalah 100%. Akumulasi pertumbuhan Omzet UMKM yang dicapai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 678,834 Milyar atau 68,6 % dari target RPJMD 2013-2018 yaitu Rp. 990 Milyar. Berdasarkan Tabel 4, pertumbuhan omzet UMKM yang dicapai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 menurun 34,2 % sedangkan perkembangannya dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat 28,1%.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa mayoritas dari 8 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1 meningkatnya jumlah koperasi aktif dengan indikator jumlah LKM, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 94,6% dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya koperas aktif	Jumlah LKM	100 %	94,6 %	5,4 %

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase koperasi aktif	Sosialisasi Prinsip Pemahaman perkoperasian	95.169.400	93.899.400	98,67
		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	71.200.000	67.700.000	95,08
		Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	102.025.000	76.990.000	75,46
		Pembinaa, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	160.670.000	145.756.000	90,72
2.	Jumlah LKM	Pembinaan dan Pemantauan Administrasi keuangan KSP/USP	199.200.000	188.440.000	94,6 %

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas secara kelembagaan maupun usaha. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Persentase koperasi aktif yang dicapai dengan capaian sebesar 30,39 % dan jumlah LKM dengan capaian 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 997.002.400 realisasi sebesar Rp. 905.111.400,- atau 90,78% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya sosialisasi prinsip pemahaman koperasi, dengan capaian terlaksana kegiatan Sosialisasi 1 kali diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari utusan koperasi binaan dinas koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan Pemahaman Berkoperasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, dengan capaian berhasilnya mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional (koperasi istiqomah) serta meningkatnya jumlah koperasi binaan yang berprestasi baik tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan capaian terlaksananya pemantauan terhadap koperasi binaan utamanya koperasi pengelola usaha simpan pinjam (35 Koperasi Binaan), Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP, dengan capaian terlaksana pembinaan dan penilaian kesehatan bagi koperasi binaan khususnya koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam di wilayah kota dan kecamatan (20 koperasi binaan), Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP, dengan capaian terlaksana pembinaan dan pemantauan administrasi keuangan koperasi dan pemberian bantuan peralatan kerja bagi 11 Koperasi berbasis perempuan.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain luasnya cakupan wilayah binaan koperasi di kabupaten Bone yang tidak sebanding dengan jumlah aparat pembina yang ada dan masih

kurangnya minat masyarakat untuk berkoperasi serta masih kurangnya pemahaman berkoperasi yang benar (sehat) oleh pihak gerakan koperasi sehingga kesadaran masyarakat maupun gerakan koperasi masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan serta diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis yang memiliki keahlian dibidang koperasi termasuk penambahan tenaga penyuluh koperasi.

B. Sasaran 2: Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM	4.570	11.708	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM, dengan capaian **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 11.708 UKM , dari target 4.570 UKM dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

Tabel 3.10 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM	3.021	9.628	11.708

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 % dari target 4.570 UKM, mengalami kenaikan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 45,5 %

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah dengan indikator kinerja jumlah UKM Non BPR / LKM UKM adalah sebesar 100%. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibangun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2017 sampai 2018 rata-rata sebesar 21,6% setiap tahunnya.

Sedangkan persentase capaian dari target RPJMD sebesar 100% sehingga target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai.

Masih adanya usaha mikro yang belum tersentuh dikarenakan belum optimalnya kegiatan pendataan usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu masih banyaknya produk hukum

koperasi dan UKM yang belum tersosialisasi dan belum dipahami oleh masyarakat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa mayoritas dari 8 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 2 Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah dengan indikator jumlah UKM Non BPR / LKM UKM, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,63% dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendukung produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	100 %	99,63 %	0,37 %

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Pendataan UMKM	80.900.000	80.600.000	99,63 %
		Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	274.960.000	271.669.700	98,80 %

Program dari sasaran ini adalah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Jumlah UKM yang dicapai dengan capaian sebesar 100 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 437.660.000 realisasi sebesar Rp. 428.034.700,- atau 97,80% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya Pendataan UKM di beberapa kecamatan dengan capaian tersedianya Dokumen Database UMKM kab. Bone yang lebih akurat serta penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah, dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran tahun 2018 :

- Melaksanakan pameran Bone Expo di Bulan April Tahun 2018.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti Pekan Raya UKM di Ex pasar Sentral Bone.

- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran APKASI di Jakarta.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pasar murah di watampone.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran Pembangunan di Makassar.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran EXPO Sul-Sel di Makassar.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran EXPO di Lombok dan Batam
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran Dekranasda di Kota Makassar.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain masih kurangnya akses pasar bagi pelaku usaha mikro dan serta luasnya cakupan wilayah binaan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Bone yang tidak sebanding dengan jumlah aparat pembina yang ada serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung dilapangan sehingga diperlukan alternatif lain dalam pemasaran produk UKM misalnya dengan mamaksimalkan pemanfaatan IT dalam pemasaran produk UKM dan masih perlunya dilakukan kegiatan pelatihan - pelatihan secara berkelanjutan serta diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis termasuk penambahan tenaga pendamping UKM .

C. Sasaran 3: Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 3*

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya produktifitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Pertumbuhan omzet koperasi (milyar)	350,346	240,639	68,7
b.	Pertumbuhan omzet UMKM (milyar)	990	678,834	68,6

1. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Pertumbuhan omzet koperasi, dengan capaian ***kurang dari target*** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai. 240,639 Milyar, dari target 350,346 Milyar dengan persentase 68,7 %. Capaian ini dikategorikan cukup. Pada tahun 2018 Jumlah koperasi meningkat dari 483 koperasi menjadi 487 koperasi sehingga terjadi peningkatan terjadi omzet koperasi di tahun 2018 sebanyak 26,33 Milyar.

Pertumbuhan omzet Koperasi diperoleh dari :

$$= \text{Jumlah omzet Koperasi 2017} + \text{Jumlah omzet Koperasi tahun 2018}$$

$$= 214,3 \text{ Milyar} + 26,33 \text{ Milyar}$$

2. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Pertumbuhan omzet UMKM (Milyar), dengan capaian ***kurang dari target*** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 678,834 Milyar , dari target 990 Milyar dengan persentase 68,6 % Capaian ini dikategorikan ***cukup***.

Pada tahun 2018 Jumlah usaha mikro meningkat dari 9628 unit menjadi 11.340 unit sehingga terjadi peningkatan omzet usaha mikro di tahun 2018 sebanyak 31,665 Milyar.

Pertumbuhan omzet UMKM diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah omzet Usaha mikro, Kecil Dan Menengah tahun 2017}) \\
 &\quad + \text{Jumlah omzet Usaha Mikro tahun 2018} \\
 &= (416,304 \text{ Milyar} + 59,315 \text{ Milyar} + 171,550 \text{ Milyar}) + 31,665 \\
 &\quad \text{Milyar}
 \end{aligned}$$

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 3

Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Pertumbuhan omzet koperasi (milyar)	498,325	214,30	240,639
b.	Pertumbuhan omzet UMKM (milyar)	325,056	416,304	678,834

Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan omzet koperasi pada tahun 2018 mencapai 68,7 % dari target.350,346 Milyar mengalami peningkatan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 12,29 %. Realisasi indikator kinerja pertumbuhan omzet UMKM pada tahun 2018 mencapai 68,6 % dari dari target 990 Milyar, mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 63,1 %.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Pertumbuhan omzet koperasi (milyar)

Berdasarkan hasil pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan Program pembangunan koperasi sehingga terbentuk 4 koperasi tambahan di tahun 2018,. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan omzet koperasi di tahun 2018 sehingga capaian omzet koperasi sebesar Rp. 240,639 Milyar atau 68,7 %. Oleh karena itu realisasi indikator pertumbuhan omzet koperasi pada tahun 2018 yaitu 68,7 % (kurang dari target) capaian RPJMD yang diharapkan.

2. Pertumbuhan Omzet UMKM

Berdasarkan Tabel 3 capaian indikator kinerja sasaran 3 dengan indikator kinerja Pertumbuhan Omzet UMKM tahun 2018 adalah 68,6%. Akumulasi pertumbuhan Omzet UMKM yang dicapai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 678,834 Milyar atau 68,6 % dari target RPJMD 2013-2018 yaitu Rp. 990 Milyar. Berdasarkan Tabel 4, pertumbuhan omzet UMKM yang dicapai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 menurun 34,2 % sedangkan perkembangannya dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat 28,1%.

d. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.15 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pertumbuhan Omzet koperasi	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus / Pengelola USP	78.304.000	74.674.000	95,36 %
2.	Pertumbuhan Omzet UMKM	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	274.960.000	271.669.7000	98,80 %

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas secara kelembagaan maupun usaha. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Pertumbuhan omzet koperasi yang dicapai dengan capaian sebesar 68,7 % dan pertumbuhan omzet UMKM dengan capaian 68,6 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 997.002.400 realisasi sebesar Rp. 905.111.400,- atau 90,78% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya pelatihan manajemen akuntansi koperasi bagi pengurus pengelola USP, dengan capaian terlaksana pelatihan satu kali yang diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari koperasi kota dan kecamatan dan diharapkan tertibnya administrasi penyusunan laporan keuangan koperasi dan

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan capaian ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran tahun 2018

- Melaksanakan pameran Bone Expo di Bulan April Tahun 2018.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti Pekan Raya UKM di Ex pasar Sentral Bone.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran APKASI di Jakarta.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pasar murah di watampone.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran Pembangunan di Makassar.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran EXPO Sul-Sel di Makassar.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran EXPO di Lombok dan Batam
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran Dekranasda di Kota Makassar

e. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 3 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain masih kurangnya akses pasar bagi produk koperasi dan UMKM,rendahnya pengetahuan / kemampuan gerakan koperasi maupun pelaku usaha mikro dalam pengeolahan produk termasuk kemasan shingga masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan pelatihan – pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan dan perlunya pengetahuan dalam hal pemanfaatan IT sebagai alternatif pemasaran produk koperasi dan UMKM serta

diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis yang memiliki keahlian teknis.

D. Sasaran 4: Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional	6	6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional, dengan capaian **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 6 Kali / kegiatan , dari target 6 kali/kegiatan dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran

Tabel 3.17 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional	5	5	6

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 %.dari target.6 kali / kegiatan, mengalami kenaikan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya)sebesar 20 %

c. Analisis *Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.*

Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 4 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional adalah sebesar 100%. Perkembangan pembinaan koperasi dan UKM dalam memfasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov / Nasional dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan ditahun 2018 sebesar 20 %.

Sedangkan persentase capaian dari target RPJMD sebesar 100% sehingga target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai.

Masih terbatasnya koperasi dan usaha mikro yang telah difasilitasi dikarenakan kurangnya aparat pembina yang mampu menjangkau luas wilayah kabupaten Bone dan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut yaitu peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa mayoritas dari 8 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 4 terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan dengan indikator Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 89,62 % dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya mekanisme permodalan bagi koperasi,	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraa	100 %	89,62 %	10,38 %

	usaha kecil dan menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan keuangan	n antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional			
--	--	--	--	--	--

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.19 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional	Peningkatan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	38.878.000	34.843.000	89,62

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas secara kelembagaan maupun usaha. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional yang dicapai dengan capaian sebesar 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 997.002.400 realisasi sebesar Rp. 905.111.400,- atau

90,78 % dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi dengan capaian terlaksananya fasilitasi kemitraan koperasi dengan pihak ketiga

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Masih lemahnya manajemen dan pengelolaan usaha oleh gerakan koperasi mengakibatkan kurangnya pemahaman dan minat pihak pengurus / pengelola koperasi untuk memanfaatkan peluang modal yang diberikan oleh pihak ketiga / pihak bank sehingga diperlukan penajaman kegiatan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator sasaran.

E. Sasaran 5: Meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Jumlah anggota koperasi	105.044	70.865	67,5 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Jumlah anggota koperasi, dengan capaian kurang dari target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 70.865 orang , dari target 105.044 orang dengan persentase 67,5 % Capaian ini dikategorikan **cukup**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 5

Tabel 3.21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah anggota koperasi	105.452	137.401	70.865

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 67,5 % dari target 105.044, mengalami penurunan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 48,4 %

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Jumlah anggota koperasi

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 5 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran meningkatnya akses koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana dengan indikator kinerja Jumlah anggota koperasi adalah sebesar 67,5 %. Perkembangan pembinaan koperasi khususnya terhadap perkembangan jumlah anggota koperasi tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 48,4 %.

Sedangkan persentase capaian dari target RPJMD sebesar 67,5 % menyebabkan target RPJMD pada tahun 2018 belum tercapai.

d. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel. 3.22 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah Anggota koperasi	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	76.990.000	76..908.0000	99,89
		Pembinaan dan pemantauan administrasi koperasi pengelola pasar tradisional	69.100.000	55.585.000	80,44

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas secara kelembagaan maupun usaha. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Jumlah anggota koperasi yang dicapai dengan capaian sebesar 67,5 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 997.002.400 realisasi sebesar Rp. 905.111.400,- atau 90,78 % dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, dengan capaian terlaksananya kegiatan penyuluhan sebanyak 6 kali yang diikuti oleh 120 Wanita Usia Produktif di Kec.Cina, Kec. Libureng, Kec.Dua Boccoe, Kec. Tellu Lompoe, Kec. Bontocani dan Kec.Sibulue sehingga

terbentuk koperasi wanita di kec.Cina, Kec. Libureng, Kec.Dua Boocoe, Kec. Tellu Limpoe, Kec. Bontocani dan Kec. Sibulue dan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelola Pasar Tradisional dengan capaian terlaksananya pembinaan dan pemantauan administrasi 11 koperasi pengelola pasar.

e. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Masih terbatasnya pembinaan terhadap koperasi dikarenakan luas wilayah binaan yang tidak sebanding dengan aparat pembina yang ada serta masih diperlukannya penambahan sarana kendaraan operasional untuk penyuluhan sehingga pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dan pembinaan dan pemantauan administrasi koperasi pengelola pasar tradisional menjadi belum optimal

F. Sasaran 6: Meningkatnya kapasitas SDM pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas SDM pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Jumlah pegawai koperasi	6.274	4.131	66 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Jumlah pegawai koperasi, dengan capaian kurang dari target yang telah

ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 4.131 orang, dari target 6.274 orang dengan persentase 66 %. Capaian ini dikategorikan **cukup**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 5

Tabel 3.24 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah pegawai koperasi	6.311	1.690	4.131

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 66 %. dari target 6.274, mengalami peningkatan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 59 %

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Jumlah pegawai koperasi

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 6 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kapasitas SDM pengelola koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan produksi dengan indikator kinerja Jumlah pegawai koperasi adalah sebesar 66 %. Perkembangan pembinaan koperasi khususnya terhadap perkembangan pertumbuhan jumlah pegawai koperasi tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 73,2 % sedang di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 59,1 % Sedangkan persentase capaian dari target RPJMD sebesar 66 %

menyebabkan target RPJMD pada tahun 2018 belum tercapai.

d. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.25 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah pegawai koperasi	Pelatihan manajemen akuntansi koperasi bagi pengurus / pengelola USP	78.304.000	74.674.000	95,36

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan koperasi yang berkuallitas secara kelembagaan maupun usaha. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Jumlah pegawai koperasi yang dicapai dengan capaian sebesar 66 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 997.002.400 realisasi sebesar Rp. 905.111.400,- atau 90,78 % dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Pengelola USP, dengan capaian terlaksana pelatihan satu kali yang diikuti oleh 25 orang peserta yang besasal dari koperasi kota dan kecamatan dan diharapkan tertibnya administrasi penyusunan laporan keuangan koperasi.

e. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Masih terbatasnya pembinaan terhadap gerakan koperasi dikarenakan luas wilayah binaan yang tidak sebanding dengan aparat pembina yang ada serta masih diperlukannya penambahan sarana kendaraan operasional untuk penyuluhan sehingga pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu Pelatihan Manajemen akuntansi koperasi bagi pengurus dan pengelola USP menjadi belum optimal

G. Sasaran 7: Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standard akuntansi baku

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 7*

**Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha
koperasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan
standard akuntansi baku**

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Pertumbuhan aset koperasi (milyar)	288,817	1.108,788	100
b.	Pertumbuhan aset UMKM (milyar)	125	271,765	100

1. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Pertumbuhan aset koperasi, dengan capaian **lebih dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 1.108,788 Milyar, dari target 288,817 Milyar dengan persentase 100 %. Capaian ini dikategorikan baik. Pada tahun 2018 Jumlah koperasi meningkat dari 483 koperasi menjadi 487 koperasi sehingga terjadi peningkatan aset koperasi di tahun 2018 sebanyak 26,33 Milyar.

Pertumbuhan omzet Koperasi diperoleh dari :

= Jumlah aset Koperasi 2017 + Jumlah aset Koperasi tahun 2018

= 1.019,1 Milyar + 89,69 Milyar

2. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Pertumbuhan aset UMKM (Milyar), dengan capaian **lebih dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 271,765 Milyar , dari target 125 Milyar dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan baik.

Pada tahun 2018 Jumlah usaha mikro meningkat dari 9628 unit menjadi 11.340 unit sehingga terjadi peningkatan aset usaha mikro di tahun 2018 sebanyak 31,665 Milyar.

Pertumbuhan aset UMKM diperoleh dari :

= (Jumlah aset Usaha mikro, Kecil Dan Menengah tahun 2017) + Jumlah aset Usaha Mikro tahun 2018

= (163,975 Milyar + 28,863 Milyar + 70,615 Milyar) + 8,312 Milyar

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 7

Tabel 3.27 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Pertumbuhan aset koperasi (milyar)	286,321	1.091,1	1.108,788
b.	Pertumbuhan aset UMKM (milyar)	125,333	163,975	271,765

Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan aset koperasi pada tahun 2018 mencapai 100 % dari target 288,817 Milyar mengalami

peningkatan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 1,62 %. Realisasi indikator kinerja pertumbuhan aset UMKM pada tahun 2018 mencapai 100 % dari target 125 Milyar, mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 65,74 %.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Pertumbuhan aset koperasi (milyar)

Berdasarkan hasil pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan pembentukan koperasi sehingga terbentuk 4 koperasi tambahan di tahun 2018. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan aset koperasi di tahun 2018 sehingga capaian aset koperasi sebesar Rp. 1.108,788 Milyar atau 100 %. Oleh karena itu realisasi indikator pertumbuhan aset koperasi pada tahun 2018 yaitu 100 % (lebih dari target) capaian RPJMD yang diharapkan.

2. Pertumbuhan aset UMKM

Berdasarkan Tabel 7 capaian indikator kinerja sasaran 7 dengan indikator kinerja Pertumbuhan aset UMKM tahun 2018 adalah 100 %. Akumulasi pertumbuhan aset UMKM yang dicapai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 271,765 Milyar atau 100 % dari target RPJMD 2013-2018 yaitu Rp. 125 Milyar. Berdasarkan Tabel 4, pertumbuhan aset UMKM yang dicapai dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat 30,8 %, sedangkan perkembangan aset UMKM di tahun 2018 meningkat sampai 65,7 %

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa mayoritas dari 8 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Sebagai contoh, untuk sasaran 7 Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koeprasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku dengan indikator kinerja pertumbuhan aset koperasi dan pertumbuhan aset UKM, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya rata rata sebesar 92,85 % dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.28 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koeprasi, usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan standar akuntansi baku	Pertumbuhan aset koperasi	100 %	85,65 %	14,35 %
			100 %	94,60 %	5,4 %
		Pertumbuhan Aset UMKM	100 %	98,29 %	1,71 %

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.29 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pertumbuhan Aset koperasi	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	105.466.000	90.316.000	85,65 %
		Pembinaan / Pemantauan administrasi keuangan KSP/USP	199.200.000	188.440.000	94,60
2.	Pertumbuhan Aset UMKM	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemetintah Bagi Usaha Mikro	46.700.000	45.900.000	98,29 %

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas secara kelembagaan maupun usaha serta Usaha mikro kecil menengah yang berdaya saing. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Pertumbuhan aset koperasi yang dicapai dengan capaian sebesar 100 % dan pertumbuhan aset UMKM dengan capaian 100 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program kualitas kelembagaan koperasi sebesar Rp. 997.002.400 realisasi sebesar Rp. 905.111.400,- atau 90,78% dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah sebesar 437.660.000 realisasi sebesar Rp. 428.034.700,- atau 97,80 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD, dengan capaian terlaksana kegiatan pelatihan 1 kali diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari utusan koperasi binaan dinas koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta koperasi tentang pengelolaan administrasi usaha koperasi, Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP, dengan capaian terlaksana pembinaan dan pemantauan administrasi keuangan koperasi dan pemberian bantuan peralatan kerja bagi 11 Koperasi berbasis perempuan) dan kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan capaian terlaksana monitoring dan evaluasi usaha bagi UMKM penerima bantuan wirausaha

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 7 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan antara lain masih kurangnya pemahaman gerakan koperasi serta pelaku usaha mikro dalam pengelolaan manajemen koperasi sehingga masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan pelatihan – pelatihan manajemen koperasi secara berkelanjutan dan perlunya pemantauan dan pengawasan yang terhadap penggunaan dana pemerintah oleh aparat pembina koperasi dan UKM.

b. Sasaran 8: Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil dan menengah.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil dan menengah

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Jumlah Pegawai UKM	16.000	29.257	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Jumlah pegawai UKM, dengan capaian **telah melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 29.257 orang, dari target 16.000 Orang dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

Tabel 3.31 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah Pegawai UKM	9.843	24.348	29.257

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 %. dari target 16.000 Orang, mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 59,6 % sedang tahun 2018)sebesar 20,16 %

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Jumlah Pegawai UKM

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 8 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan indikator kinerja pegawai UKM adalah sebesar 100%. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi ditahun 2017 sampai 2018 rata-rata sebesar 39,8 % setiap tahunnya.

Sedangkan persentase capaian dari target RPJMD sebesar 100% sehingga target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai.

Masih banyaknya usaha mikro yang belum tersentuh pembinaan dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pendataan usaha mikro kecil dan menengah.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa mayoritas dari 8 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 8 Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan indikator jumlah pegawai UKM, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 98,8 % dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini

sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah pegawai UKM	100 %	98,8 %	1,2 %

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.33 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	274.960.000	271.669.700	98,80 %

Program dari sasaran ini adalah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing. Adapun Indikator Kinerja dari

sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Jumlah pegawai UKM yang dicapai dengan capaian sebesar 100 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 437.660.000 realisasi sebesar Rp. 428.034.700,- atau 97,80% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah, dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran tahun 2018 :

- Melaksanakan pameran Bone Expo di Bulan April Tahun 2018.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti Pekan Raya UKM di Ex pasar Sentral Bone.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran APKASI di Jakarta.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pasar murah di watampone.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran Pembangunan di Makassar.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran EXPO Sul-Sel di Makassar.
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran EXPO di Lombok dan Batam
- Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran Dekranasda di Kota Makassar.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 8 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan antara lain masih kurangnya akses pasar bagi pelaku usaha mikro dan serta luasnya cakupan wilayah binaan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Bone yang tidak sebanding dengan jumlah aparat pembina yang ada serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung

dilapangan sehingga perlunya dilakukan kegiatan pelatihan - pelatihan terhadap pelaku usaha mikro secara berkelanjutan serta diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis termasuk penambahan tenaga pendamping UKM

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.462.148.190,- (92,98%)

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 1.652.232.090,- (91,84%)
- Belanja Langsung Rp. 2.809.916.100,-(93,66%)

Jumlah	Rp. 4.462.148.190,-(92,98%)
--------	-----------------------------

2. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Koperasi dan UKM dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.652.232.090,- (91,84%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp.1.533.020.486,
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 119.211.604,

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Koeprasi dan UKM Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.809.916.100,- (93,66%) dengan jumlah 7 program dan 28 kegiatan.

4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

a. Penghargaan yang diterima

Melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Kegiatan Pembinaan , Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi yang indikator kinerjanya adalah tercapainya koperasi berprestasi tingkat nasional maupun provinsi berhasil mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi di tahun 2018, yaitu :

- KPRI ISTIQAMAH Tingkat Nasional
- KPRI KENAL Tingkat Provinsi

b. Capaian kinerja strategis lainnya

Terkait dengan perubahan indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Bone (Perbub Nomor : 87 Tahun . 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemetintah kabupaten Bone) didalamnya terdapat perubahan Indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone.

Indikator kinerja utama (IKU) tersebut, hingga tahun 2018 digambarkan pada tabel berikut ini :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	Persen	$\frac{\text{(Jumlah Koperasi sehat)}}{\text{(Jumlah koperasi aktif)}} \times 100 \%$ Tipe penghitungan : Kumulatif	Rekap hasil Instrumen Penilaian Koperasi sehat (data Bidang Kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi)
Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Persen	$\frac{\text{(Jumlah usaha kecil Tn - Tb)}}{\text{(Usaha kecil Tb)}} \times 100 \%$ Tipe perhitungan : kumulatif	Rekap laporan data UKM (ODS)

	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	(Jumlah usaha mikro dan kecil / (Jumlah Seluruh Usaha Mikro Dan Kecil) X 100 % Tipe perhitungan : komulatif	Rekap laporan data UKM (ODS)
--	----------------------------------	--------	---	------------------------------

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan UKM tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat dan rendahnya minat pengurus koperasi dalam mendukung kelancaran kegiatan yang membutuhkan tenaga teknis sebagai pengelola yang profesional.
2. Terbatasnya aparat pembina Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah dalam menjangkau luas wilayah.
3. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berkoperasi dan masih kurangnya pemahaman berkoperasi yang benar (sehat) oleh pihak gerakan koperasi.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan dan pemantauan / pembinaan koperasi dan usaha mikro
5. Masih adanya produk hukum koperasi dan UKM yang belum tersosialisasikan dan belum dipahami masyarakat dan pihak gerakan koperasi dan pelaku usaha mikro.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM

2. Diharapkan adanya penambahan Personil dari aparat Pembina (PNS) yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya.
3. Untuk mendukung kelancaran kegiatan diperlukan adanya peningkatan pembinaan/pelatihan (Bimtek) kepada aparat pembina serta pengurus koperasi serta pelaku usaha mikro / wirausaha baru
4. Perlunya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pendataan ulang yang akurat terhadap lembaga Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Koperasi Dan UKM juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan UKM Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi Dan UKM pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 6 indikator memenuhi kriteria baik dan 4 indikator memenuhi kriteria cukup.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan

program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi Dan UKM ke depan antara lain tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan UKM dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan UKM, Usaha koperasi dan UKM menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta Kreativitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru

Bagi instansi di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Koperasi Dan UKM untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.A.YUSUF,S.IP,MH

Jabatan : **KepalaDinas**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DR.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,M.Si

Jabatan : **Bupati Bone**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak *pertama* berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak *Kedua* akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 02 Januari 2018


PIHAK KEDUA

DR.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si


PIHAK PERTAMA

H.A.YUSUF,S.IP,MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

INSTANSI : DINAS KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BONE

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	Persen	51,13
		Jumlah LKM	Unit	4
	Terciptanya iklim usaha kondusif yang mendukung produktivitas koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	Unit	4.570
2.	Meningkatnya produktivitas produk unggulan KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Rupiah	350.346
		Pertumbuhan Omzet UKM Milyar	Rupiah	990
3.	Terciptanya mekanisme permodalan bagi Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah berbasis masyarakat dan jaringan kelembagaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov/Nasional	Kegiatan	6
	Meningkatnya akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	105.044
4.	Meningkatnya kapasitas SDM pengelola Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan produksi	Jumlah pegawai Koperasi	Orang	6.274
	Meningkatnya cakupan pelaksanaan manajemen usaha koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah yang sesuai dengan standar akreditasi baku	Pertumbuhan Aset Koperasi	Rupiah (Milyar)	288,817
		Pertumbuhan Aset UKM	Rupiah (Milyar)	125
5.	Tersedianya lapangan kerja yang memadai melalui peranan koperasi , Usaha Kecil Menengah	Jumlah pegawai UKM	Orang	16.000

Program

Anggaran

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | Rp. 618.667.300,- |
| 2 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Rp. 549.270.300,- |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp100.000.000,- |
| 4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Rp. 48.300.000,- |
| 5 | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BaPgi Usaha Mikro Kecil Menengah | Rp.323.560.000,- |
| 6 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Rp. 817.102.400,- |
| 7 | Fasilitas Pengembangan Indikator Teknologi dan Bisnis | Rp. 43.100.000,- |

Watampone, 02 Januari 2018



 BUPATI BONE

 (DEHA FAHSAR M.PADJALANGI,M.Si)



 KEPALA DINAS

 (H. A. YUSUF, S.IP, MH)

Lampiran Foto

PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018



PEMBINAAN KOPERASI TAHUN 2018

